

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DALAM UPAYA MEMINIMALISIR TUNGGAKAN KREDIT

**(Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Unit Tanjungrejo Malang)**

Imroatul Khasanah
Achmad Husaini
Devi Farah Azizah
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja, dan untuk mengetahui cara meminimalisir tunggakan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah struktur organisasi, prosedur pemberian kredit dan penerimaan angsuran, formulir dan dokumen yang berhubungan dengan prosedur pemberian dan penerimaan angsuran. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Account Officer dan Kepala Unit. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pembagian tugas pada struktur organisasi telah berjalan dengan baik, akan tetapi untuk jumlah personil Account Officer masih perlu ditambah. Adanya formulir yang pengisiannya dilakukan oleh Costumer Service, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengisian data calon debitur. Formulir dan dokumen yang digunakan juga cukup baik karena mudah dipahami oleh calon debitur, sehingga memudahkan pengisiannya.

Kata Kunci: sistem dan prosedur pemberian kredit, kredit modal kerja, tunggakan kredit

1. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi masyarakat dan perekonomian suatu negara secara keseluruhan tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Peranan perbankan untuk memajukan perekonomian suatu negara dalam dunia modern ini sangatlah besar. Bank pada dasarnya merupakan industri sejenis di mana seluruh bank dapat menawarkan dan melayani berbagai jenis produk, baik itu produk yang berbeda maupun produk yang sama. Bank dilihat dari segi persaingannya antara yang satu dengan yang lain setiap jenis produk atau jasa yang sama dapat dimodifikasi sedikit atau sepenuhnya, walaupun produk atau jasa tersebut sudah ada. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dibuat oleh bank untuk menarik minat nasabah.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank pemerintah yang telah berubah statusnya menjadi PT (Persero), masih berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional dengan menyediakan pelayanan dalam jasa perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan perbankan yang diberikan oleh BRI adalah dibidang perkreditan dengan sasaran utama pengusaha kecil dan menengah ke atas. Pada umumnya kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja. Kredit jenis ini biasanya diperuntukkan bagi calon nasabah yang ingin memulai suatu usaha baru atau bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya. Mengingat persaingan yang terjadi diantara bank-bank yang ada maka di dalam pelayanan pemberian kredit ini BRI menetapkan suatu sistem dan prosedur

pemberian kredit yang bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan peminjaman.

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang bergerak di bidang jasa perbankan, pemberian kredit merupakan produk bank yang menjadi andalan masyarakat sebagai salah satu aktivitas untuk menghasilkan pendapatan utama disamping aktivitas pelayanan bank lainnya. Produk pemberian kredit ini merupakan salah satu pendapatan utama bank, namun beberapa kredit yang diberikan bank dapat menjadi suatu permasalahan yang serius apabila terdapat adanya kredit macet. Analisis terhadap pemberian pinjaman kredit kepada calon nasabah itu sangat penting untuk menjamin aktivitas bank sehingga bank dapat mengendalikan penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki sehingga dapat menekan timbulnya risiko kredit, yaitu dengan jalan mengadakan analisis terhadap kredit yang akan diajukan oleh calon nasabah sebelum kredit tersebut diberikan. Setelah bank memberikan pinjaman kredit pada nasabah, bank juga perlu melakukan pengawasan secara berkala, sehingga debitor dapat memenuhi kewajibannya agar tidak sampai terjadi tunggakan kredit yang nantinya berdampak pada terjadinya kredit macet.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang memfokuskan pelayanan kepada masyarakat kecil dalam membantu masalah permodalan dalam upaya meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik. Fasilitas kredit yang diberikan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES), yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan tingkat produksi operasional, dan juga untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas usaha calon debitor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja, dan untuk mengetahui cara meminimalisir

tunggakan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2010:5). Sistem adalah satu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan klerikal (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (W. Gerald Cole yang dikutip oleh Baridwan, 2002:3). Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri atas jaringan prosedur-prosedur yang saling berkaitan. Prosedur merupakan urutan dari pekerjaan klerikal, yang dibuat atas semua transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kredit, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi (Baridwan, 2002:3).

Sistem Akuntansi diartikan sebagai jaringan yang terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat dan sumber daya manusia dalam rangka menghasilkan informasi pada suatu organisasi untuk keperluan pengawasan, operasi maupun untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Narko 2002:3).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah bagian-bagian atau prosedur-prosedur yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam rangkaian secara menyeluruh untuk berfungsi bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu.

2.3. Formulir dalam Sistem Akuntansi

Pengertian formulir adalah “Suatu dokumen yang memiliki ruang untuk diisi, serta berisi informasi yang telah dicetak” (Mulyadi, 2001:75). Formulir adalah “wujud fisik rekaman transaksi sebagai alat penetapan tanggungjawab dan permintaan dilakukannya suatu kegiatan” (Widjajanto, 2001:32).

2.4. Definisi Bank

“Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya” (Kasmir, 2010:11).

Sedangkan pengertian lain menurut Sawaldjo Puspoprano (2004:5), “Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit”.

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana melalui simpanan nasabah dan menyalurkan dana berupa kredit modal kerja terhadap nasabah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.5. Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No.10, 1998:10).

2.6. Kredit Modal Kerja

“Kredit Modal Kerja (kredit *exploitasi/modal lancar/working capital*) yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya” (Firdaus, 2008:10). “Kredit Modal Kerja di mana kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, digunakan untuk menunjang perputaran usahanya” (Supriyono, 2011:94).

2.7. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu jenis kredit modal kerja mikro pada bank, yang sasaran atau targetnya merupakan pelaku usaha mikro. Untuk plafon kredit mikro maksimal Rp 20 juta, dengan suku bunga efektif maksimal 22% per tahun dan jangka waktu maksimal 3 tahun. Dalam pelaksanaannya, agunan yang digunakan bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Sesuai dengan kemampuan calon debitur dan nilai agunan (komite-kur.com/bank_bri.asp).

2.8. Prosedur Pemberian Kredit

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekuarangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak (Kasmir, 2010: 95).

2.9. Tunggalan Kredit

Tunggakan kredit atau yang disebut dengan kredit bermasalah adalah kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus diselesaikan dengan berbagai cara. Jika kredit tersebut menjadi macet, maka secara tidak langsung, juga akan merugikan masyarakat pemilik dana (Mahmoeddin, 2002:1).

Pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debitornya tidak memenuhi persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya (Mahmoeddin, 2002:3).

Pengertian khusus atau menurut pengertian pihak perbankan (terutama cabang bank asing di Indonesia), menganggap suatu kredit bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya (Laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akuntan publik, laporan produksi dan persediaan bulanan, dst) (Mahmoeddin, 2002:3).

2.10. Penyebab Timbulnya Tunggalan Kredit

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek

kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

2. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah, disebabkan oleh :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah. Misalnya banjir atau kebakaran (Kasmir, 2010:108).

2.11. Penyelesaian Kredit Macet

1. *Rescheduling*

Yaitu dengan cara :

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
 - d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- ## 3. *Restructuring*
- Yaitu dengan cara :
- a. Menambah jumlah kredit.
 - b. Menambah equity, yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.
- ## 4. Kombinasi
- Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.
- ## 5. Penyitaan jaminan
- Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya (Kasmir, 2010:109).

2.12. *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas lancar, diragukan, dan macet. *Non Performing Loan* atau risiko kredit bermasalah pada setiap bank tidak boleh melebihi ketetapan maksimal *Non Performing Loan* dari Bank Indonesia yaitu 5%. Karena apabila lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Apabila tingkat *Non Performing Loan* yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit, di mana banyaknya kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank (Almilia, 2005:13).

2.13. *Pengawasan Kredit*

Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Mulyono, 2001:460).

“Pengawasan kredit adalah proses penilaian dan pemantau kredit sejak analisis, bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan/penyimpangan debitor khususnya dalam menggunakan kredit, melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit” (Abdullah, 2005:95). “Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi

kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar” (Arthesa, 2006:181). Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan kredit dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit sebagai kekayaan bank agar tetap lancar, produktif dan tidak macet, dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan kredit yang ada.

2.14. Tujuan Pengawasan Kredit

“Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan, dan pengawasan kredit sebagai asset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank” (Suhardjono, 2003:232).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah struktur organisasi, prosedur pemberian kredit dan penerimaan angsuran, formulir dan dokumen yang berhubungan dengan prosedur pemberian dan penerimaan angsuran. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari *Account Officer* dan Kepala Unit. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini, adalah menganalisis struktur organisasi, sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja, formulir dan dokumen yang digunakan, dan NPL dari tahun 2010-2012.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Struktur Organisasi

Dari data yang diperoleh peneliti, struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang telah terdapat pembagian tugas/*job description* yang baik. Setiap posisi menjalankan tugasnya dengan

baik dengan jumlah personil yang cukup, namun untuk bagian *Account Officer* peneliti menyarankan untuk menambah jumlah personil yang mulanya berjumlah 4 orang menjadi 5-6 orang. Alasan peneliti adalah dikarenakan salah satu kegiatan utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang adalah penyaluran kredit modal kerja sehingga dapat dipastikan bank memiliki jumlah debitor dan calon debitor yang banyak. Sehingga agar penyaluran kredit modal kerja dan pengawasan kredit dapat berjalan dengan lancar maka penambahan jumlah personil perlu dilakukan.

4.2. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat pengajuan kredit modal kerja, pengisian data pada formulir pengajuan pinjaman dilakukan oleh *Customer Service*. Seharusnya calon debitor mengisi sendiri formulir pengajuan pinjaman, untuk mencegah terjadinya penyimpangan data yang dapat menimbulkan kerugian pihak bank. Apabila calon debitor mendapatkan kesulitan dalam mengisi formulir dapat ditanyakan langsung kepada *Customer Service*.
- b. Penilaian agunan/jaminan dan pemeriksaan ke tempat usaha calon debitor dilakukan oleh *Account Officer* dengan teliti. Pada saat melakukan kunjungan terhadap calon debitor, hendaknya *Account Officer* menanyakan kepemilikan agunan yang dijaminan kepada bank tersebut. Jika agunan merupakan milik calon debitor sendiri, maka seharusnya calon debitor harus menunjukkan bukti kepemilikan agunan yang akan diserahkan kepada bank. Besarnya nilai agunan yaitu sampai seberapa besar agunan tersebut meng-cover kredit modal kerja yang akan

diberikan nantinya. Dalam pemeriksaan ke tempat usaha calon debitur, *Account Officer* harus menanyakan kepemilikan tempat yang dijadikan usaha tersebut, milik sendiri atau kotrak. Jika tempat tersebut kotrak, maka sebaiknya *Account Officer* menanyakan seberapa lama tempat usaha tersebut dikontrak, jika perlu diberikan bukti yang mendukung. Hal ini dilakukan agar pinjaman yang akan diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.

- c. Putusan Kredit (PTK) terhadap permohonan kredit calon debitur dilakukan setelah dilakukannya analisis oleh *Account Officer*. Tahap analisis tersebut yaitu *Account Officer* melakukan kunjungan langsung (*on the spot*), sehingga dapat diketahui kondisi sesungguhnya calon debitur beserta usaha yang dijalankan. Setelah melakukan kunjungan langsung (*on the spot*), *Account Officer* membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), berkas SKPP terdisposisi, laporan usulan dan rekomendasi, laporan penilaian jaminan dan laporan penilaian hasil pemeriksaan di lapangan kemudian dijadikan dasar analisis dan evaluasi lebih lanjut. Hasil analisis dan evaluasi kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK). Kepala Unit memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari *Account Officer* dalam memberikan putusan kredit dan juga putusan nominal nilai kredit nantinya, akan tetapi terkadang saat *Account Officer* melakukan kunjungan langsung (*on the spot*) namun penilaian *Account Officer* masih diragukan, maka dilakukan kunjungan ulang oleh *Account Officer* dan Kepala Unit terhadap calon debitur.
- d. Pelaksanaan kunjungan ke tempat debitur hanya dilakukan sekali pada 1 bulan setelah pencairan kredit dan secara insidental yang berlangsung secara tidak teratur. Selain itu, kunjungan juga akan dilakukan lagi terhadap nasabah yang

mengalami masalah atau terjadi keterlambatan atau penunggakan oleh debitur. Sebaiknya kunjungan ini dilakukan minimal tiap satu bulan sekali, agar pihak bank mendapatkan informasi yang baru dan jelas setiap bulannya tentang perkembangan usaha debitur yang dibiayai oleh pihak bank, sehingga pihak bank dapat mengetahui secara dini jika terjadi permasalahan yang mungkin timbul dan membantu mencari jalan keluarnya. Selain itu juga perlu dilakukannya inspeksi mendadak atau inspeksi non dinas sebagai upaya pengendalian intern terhadap debitur dalam menekan terjadinya tunggakan kredit.

4.3. Analisis Formulir dan Dokumen yang Digunakan

Formulir dan dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang sekitar 16 macam. Menurut peneliti, formulir dan dokumen yang digunakan sudah cukup baik karena mudah dipahami oleh calon debitur, sehingga memudahkan pengisiannya. Bagi pihak bank sendiri formulir dan dokumen yang digunakan cukup ringkas dan jelas dalam pengumpulan informasi-informasi yang dibutuhkan.

4.4. Analisis Tunggakan Kredit

Analisis tunggakan kredit dapat menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL). Tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang selama 3 periode yaitu periode yang berakhir pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dihitung berdasarkan jumlah kredit bermasalah dibagi dengan jumlah kredit yang disalurkan dikali dengan 100%. NPL atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja keuangan bank. Batas besarnya NPL yang telah ditentukan Bank Indonesia adalah 5%.

Di bawah ini merupakan data total kredit bermasalah dan total kredit disalurkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang selama 3 periode, adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Laporan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang

Periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012

Tahun	Total Kredit Bermasalah (Rp)	Total Kredit Disalurkan (Rp)	% NPL
2010	50.287.458	4.075.800.000	1,23%
2011	56.682.335	4.146.900.000	1,36%
2012	115.500.000	5.130.000.000	2,25%

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang

Perhitungan persentase (%) kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit disalurkan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{a. NPL 2010} &= \frac{50.287.458}{4.075.800.000} \times 100\% \\ &= 1,23\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. NPL 2011} &= \frac{56.682.335}{4.146.900.000} \times 100\% \\ &= 1,36\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. NPL 2012} &= \frac{115.500.000}{5.130.000.000} \times 100\% \\ &= 2,25\% \end{aligned}$$

Dari data yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan total kredit disalurkan diikuti pula oleh kenaikan total kredit bermasalah. Kenaikan yang dialami total kredit disalurkan dan total kredit bermasalah juga mempengaruhi kenaikan besarnya NPL. Terbukti pada tahun 2010 jumlah total kredit disalurkan

sebesar Rp 4.075.800.000 dengan total kredit bermasalah Rp 50.287.458 dengan besar NPL 1,23%. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan pada total kredit disalurkan yaitu sebesar Rp 4.146.900.000 dan diikuti pula kenaikan total kredit bermasalah sebesar Rp 56.682.335 dengan besarnya NPL 1,36%. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi kenaikan pesat pada total kredit disalurkan sebesar Rp 5.130.000.000 dan total kredit bermasalah sebesar Rp 115.500.000, hal ini menyebabkan kenaikan pula pada NPL sebesar 2,25%.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, meskipun besarnya NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang masih relatif rendah pada tahun 2010 sampai dengan 2011, namun pada tahun 2012 mengalami kenaikan dan diperkirakan untuk tahun-tahun selanjutnya akan mengalami peningkatan lagi. Dan untuk jumlah NPL pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang ini masih dalam batas kewajaran. Besarnya NPL pada 2 periode yang masih berada di bawah 2% masih cukup jauh dari batas maksimal NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Apabila persentase kredit bermasalah suatu bank lebih besar dibandingkan NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka hal itu akan mengakibatkan tersendatnya kegiatan perkreditan suatu bank. Besarnya NPL kredit usaha kecil dan menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang ini masih di bawah 5% maka penyaluran kredit masih dikatakan baik. Namun demikian, pihak bank perlu melakukan berbagai upaya lagi untuk meminimalkan NPL sekecil mungkin sehingga mendekati atau mencapai 0%, karena semakin rendah NPL, maka akan semakin baik tingkat penilaian kesehatan bank.

Faktor-faktor penyebab tunggakan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya musibah yang terjadi pada anggota debitor, misalnya kematian, ada keluarga yang mengalami sakit, ataupun bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Hal ini akan menyebabkan kondisi keuangan dari debitor tidak terkontrol, akhirnya akan menyebabkan ketidakmampuan untuk membayar angsuran yang berakibat terjadinya tunggakan kredit.
- b. Menurunnya usaha debitor, misalnya turunnya omset penjualan yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitor untuk membayar angsuran yang akhirnya akan terjadi tunggakan kredit.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kurangnya jumlah tenaga *Account Officer* dalam menjalankan tugas kegiatan perkreditan dibanding dengan jumlah debitor yang ada, yaitu berjumlah 4 orang.
2. Pengisian data calon debitor pada formulir pengajuan pinjaman dilakukan oleh *Customer Service*, berdasarkan informasi yang ada pada berkas-berkas yang telah diserahkan oleh calon debitor.
3. Pelaksanaan kunjungan ke tempat debitor tidak dilakukan secara rutin, melainkan hanya dilakukan sekali pada bulan pertama setelah pencairan kredit atau pada waktu debitor mengalami masalah atau terjadi penunggakan angsuran.
4. Tunggakan yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang disebabkan karena debitor mengalami musibah atau kegagalan usaha.

5.2. Saran

1. Diharapkan pihak bank dapat menambah jumlah tenaga *Account Officer* dengan didukung *skill* yang baik agar dalam melakukan kunjungan atau pembinaan ke tempat debitor berjalan dengan lancar.

2. Pengisian data calon debitor pada formulir pengajuan pinjaman harusnya dilakukan oleh calon debitor itu sendiri, untuk mencegah terjadinya penyimpangan data yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak bank.
3. Pelaksanaan kunjungan atau inspeksi *on the spot* sebaiknya dilakukan dengan frekuensi lebih sering, misalnya satu bulan sekali agar pihak bank dapat mengikuti perkembangan dari usaha debitor bila mana terjadi masalah dan menimbulkan tunggakan pada angsuran kredit.
4. Pengawasan pada debitor perlu dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk mengetahui secara dini permasalahan yang mungkin timbul dan membantu mencari jalan keluarnya. Selain itu perlu dilakukan inspeksi mendadak sebagai upaya pengendalian intern terhadap debitor dalam menekan terjadinya tunggakan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*. Malang: UMM Press
- Almilia, Luciana Spica dan Winny Herdiningtyas. (2005). Analisis rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan periode 2000-2002. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7:2, pg. 131-147
- Arthesa, Ade dan Edia Hadiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks
- Baridwan, Zaki. 2002. *Sistem Akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE
- Firdaus, Rachmat. 2008. *Manajemen Perkreditan Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers

- Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Sinar Multi Press
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Narko. 2002. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Puspopranoto, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori, dan Realita)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.